

BAB II

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pemberian kredit kepada masyarakat menjadi kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank peningkatan pemberian kredit oleh bank akan dapat meningkatkan pendapatan, yaitu berupa bunga atas kredit yang diberikan. Namun disamping itu, peningkatan pemberian kredit juga akan diikuti oleh tingginya tingkat resiko bagi bank. Resiko tersebut adalah tidak tertagihnya atau kredit nasabah atau biasa terjadi kredit macet. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya audit internal dan pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu internal audit dan pengendalian internal yang dapat menunjang pemberian kredit.

2.1.1. Pemberian Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank Konvensional, dalam Perbankan Konvensional, kredit lebih dikenal dengan istilah Pinjaman.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga"(Maeda et al., 2023:8)

Menurut Anwar (2022:78) Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman. Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

2.1.1.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Eka Jaya Subadi (2019:20) terdapat beberapa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

Menurut Caroline et al., (2021:97) tujuan kredit merupakan suatu yang akan dicapai dari pelaksanaan kredit seseorang atau suatu badan usaha.

Menurut Zain et al., (2020:76) tujuan kredit dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Kredit Produktif yang diberikan untuk peningkatan usaha atau produksi atau infestas

2. Kredit konsumsi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atas barang dan jasa
3. Kredit perdagangan yang diberikan untuk pembelian barang yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan

2.1.1.3. Kualitas Kredit

Menurut Sjhariatin et al., (2023:56) kualitas kredit diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lancar

Dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.

2. Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

3. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun bunga yang telah melampaui 90 hari.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.

5. Macet

Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

2.1.1.4. Indikator Pemberian Kredit

Indikator Pemberian kredit menurut Syafril (2020:96) menggunakan prinsip 5C yang harus dipenuhi nasabah yang mengajukan kredit yaitu:

1. *Character*

Dengan melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit.

2. *Capacity*

Dengan melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya.

3. *Capital*

Melihat modal yang dimiliki peminjam, untuk usaha atau bisnisnya.

4. *Collateral*

Menlihat jaminan yang diberikan calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank

5. *Condition*

Mengetahui kondisi perekonomian yang baik bersifat *general* dan *specific* pada bidang usaha yang dijadikan nasabah.

2.1.2. Audit Internal

Secara umum audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Auditor internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan efektivitas pengendalian internal. Audit internal merupakan suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian auditor internal dalam suatu perusahaan.

2.1.2.1. Pengertian Audit Internal

Definisi IIA tentang audit internal adalah fungsi evaluasi independen yang dibentuk dalam organisasi yang memantau dan mengevaluasi independen yang dibentuk dalam dalam organisasi yang memantau dan mengevaluasi kinerjanya sebagai layanan yang diberikan pada organisasi Elishabeth (2023:3)

Menurut Werastuti et al., (2022:1) Audit internal adalah suatu control organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor sering disebut internal audit dan merupakan karyawan organisasi tersebut dan bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan kepada kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi

Sedangkan Menurut Sudarmanto (2022:2) *The Institute of Internal Auditors (IIA)* menyebutkan lembaga konsorsium auditor internal secara internasional telah mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

2.1.2.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Audit internal merupakan

bagian dari organisasi yang integral dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh manajemen.

Menurut Hery (2017:39) "Audit internal secara umum bertujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa."

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Audit internal melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan lain adalah mencakup semua usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dan biaya yang wajar.

Menurut M.King (2021) Ruang lingkup audit internal adalah sebagai berikut:

1. Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan *advice* kepada pimpinan perusahaan, baik Direktur Utama maupun Direktur lainnya. Me-review dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
2. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
4. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.

5. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
6. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
7. Bekerja sama dengan audit eksternal sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal.

2.1.2.3. Indikator Audit Internal

Indikator merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian.

Menurut Noviany (2020:73) tiga indikator dalam audit internal yaitu:

a) Kualitas Audit

Indikatornya adalah :perencanaan audit, pengevaluasian informasi, menemukan dan mengkomunikasikan temuan-temuan audit.

b) Kemampuan Profesional Auditor Internal.

Indikatornya adalah independensi, kesesuaian dengan kode etik dan standar professional auditor, pelatihan dan keahlian khusus.

c) Pengaturan Organisasi

Indikatornya adalah tujuan kewenangan dan tanggung jawab, manajemen personel dan kerja sama dengan auditor eksternal.

d) Kontribusi Nilai Tambah dari Audit Internal

Indikator dari dimensi kontribusi nilai tambah dari audit internal adalah tindak lanjut temuan dan rekomendasi dari audit internal.

2.1.3. Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.

2.1.3.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Ines (2022:4) pengendalian internal adalah proses kebijakan dan prosedur dalam sistem manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan dilaporkan dan disusun sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku.

Menurut Suhayati (2019:174) pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Weli (2019:37) "Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan seluruh entitas bisnis yaitu pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal dilaksanakan untuk memberi kepastian secara wajar tentang readibilitas pelaporan keuangan perusahaan, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan kepatuhan pada hukum dan undang-undang yang berlaku."

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

2.1.3.2. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan.

Menurut Suryadharma (2019:91) tujuan Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar bahwa :

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
2. Informasi bisnis akurat
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan

2.1.3.3. Jenis Pengendalian Internal

Menurut Supriyono (2018) sistem pengendalian internal memiliki dua jenis, yaitu:

1. Pengendalian Spesifik atau Pengendalian Primer ialah pengendalian yang diterapkan pada bagian proses transaksi dan penanganan aset yang dapat terjadi penyimpangan atau kesalahan.
2. Pengendalian Umum atau Pengendalian Skunder ialah pengendalian yang dimaksud untuk memberikan lingkungan yang kondusif sehingga terciptanya pengendalian internal yang baik.

2.1.3.4. Indikator Pengendalian Internal

Indikator pengendalian internal yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Menurut Thian (2021:138) indikator sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

a. Nilai Integritas dan Etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi dalam instansi.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan instansi memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan.

d. Memiliki Struktur Organisasi

Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

e. Pembagian Wewenang dan Pembebanan Tanggung Jawab

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada agar sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak terjadi ketidakadilan.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat

Tentang pembinaan SDM penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya perusahaan mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

b. Analisis Risiko

Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

- (a) Review atas kinerja instansi yang bersangkutan
- (b) Pembinaan SDM
- (c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- (d) Pengendalian fisik atas asset
- (e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- (f) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- (g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- (h) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- (i) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

4. Informasi dan Komunikasi

Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan indikator yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen dan Kepemimpinan
- b. Penilaian Resiko
- c. Informasi dan Komunikasi

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka serta beberapa indikator yang digunakan, maka peneliti mengindikasikan elemen audit internal dan pengendalian internal sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap pemberian kredit sebagai berikut:

2.2.1. Pengaruh Audit Internal terhadap Pemberian Kredit

Audit internal pengkreditan merupakan kelanjutan dalam pengawasan kredit untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan perkreditan dan telah memenuhi prinsip pengkreditan sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengkreditan. Pengalaman telah membuktikan bahwa pemeriksaan secara independen dan berkala pada semua unit bisnis sangat diperlukan (Indonesia, Ikatan Bankir, 2018:149)

Menurut Sri et al (2022:37) penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas asset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain. Dengan meningkatkan fungsi audit internal,

penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal (*internal control*).

Adapun penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit oleh Yunita (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek Audit Internal atas penerapan pemberian kredit menunjukkan bahwa semakin baik suatu bank menerapkan audit internal maka kebijakan pemberian kreditnya akan semakin efisien dan efektif karena bank akan lebih selektif dalam pemberian kredit sehingga volume kredit yang diberikan akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan Sijabat (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Manajemen Risiko, Risiko Audit dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit, menyatakan bahwa Audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit. Artinya, semakin tinggi tingkat audit internal yang diterima oleh auditor internal ini, akan meningkatkan kualitas kebijakan pemberian kredit yang dihasilkan

2.2.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pemberian Kredit

Menurut Subagyo (2021:35) untuk menunjang keberhasilan program pengawasan kredit harus mempunyai sistem pengendalian internal yang cukup memadai. Sistem pengendalian internal kredit tersebut harus dapat diterapkan dalam semua tahap proses penyaluran kredit, mulai dan saat permintaan kredit diajukan oleh debitur sampai saat kredit dibayar lunas. Pengendalian internal juga memberikan kemungkinan untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran atas ketentuan pokok penyaluran kredit dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit.

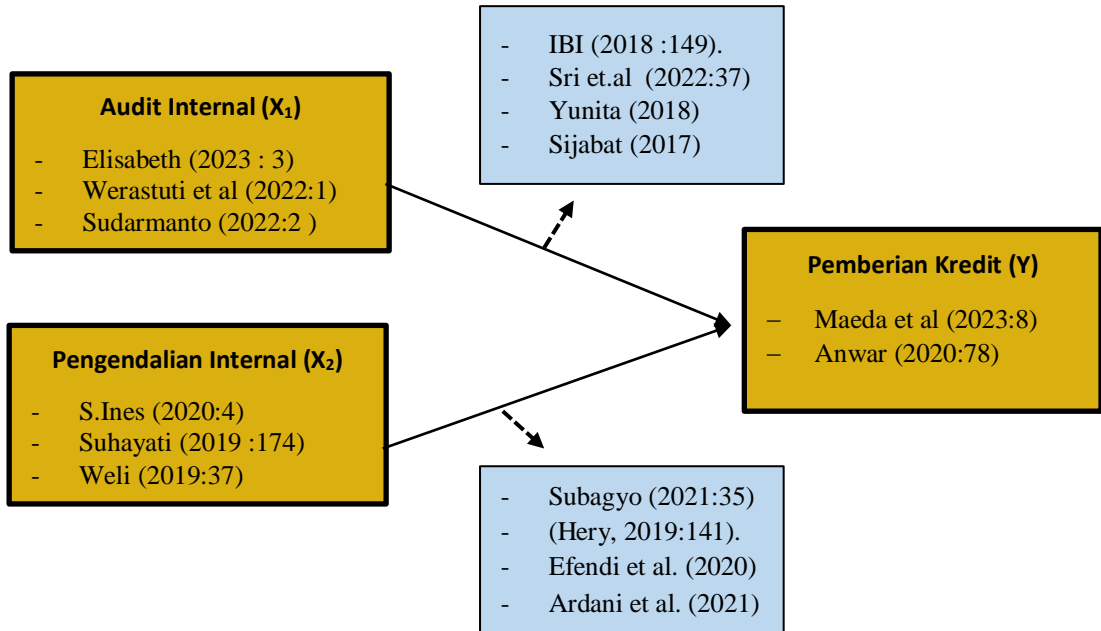
Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pengkreditan atau terjadinya praktik pemberian kredit tidak sehat. Dalam kaitan ini, hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian internal bank yang terkait dengan pengkreditan. Pengendalian internal yang baik, dapat mengurangi terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat (Hery, 2019:141).

Adapun penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pt Bank Ocbc Nisp Tbk Kota Batam oleh Effendi et al. (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap pemberian kredit menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian kredit secara positif dan signifikan. Ditinjau dari hal tersebut maka dengan adanya penerapan pengendalian internal dalam perusahaan pada karyawan dalam hal pemberian kredit maka akan meningkatkan pemberian kredit semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian Ardani et al. (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Prinsip 5c Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar, menyimpulkan bahwa adanya system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwasemin efektif system pengendalia internal maka efektivitas pemberian kredit juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut maka paradigma dalam penelitian ini sebagai

berikut :



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2018:63) mengartikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁ : Audit Internal berpengaruh terhadap Pemberian Kredit survei Bank BTN KC

Bandung.

H₂ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap terhadap Pemberian Kredit Survei Bank BTN KC Bandung.

